

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 telah selesai disusun. Perubahan rencana kerja tahun 2023 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2023. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan perubahan Renja tahun 2023 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan perubahan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tabanan, 21 Agustus 2023
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan



I. Made Subagia, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Mendasari hal tersebut, setiap tahun Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyusun Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan sektor pertanian dalam arti luas di Kabupaten Tabanan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyusunan renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengampu 5 bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Pasarana dan Sarana, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perkebunan dan Bidang Penyuluh.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan rencana kerja Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Perubahan rencana kerja Tahun 2023 Dinas Pertanian nantinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang

akan ditetapkan dalam Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

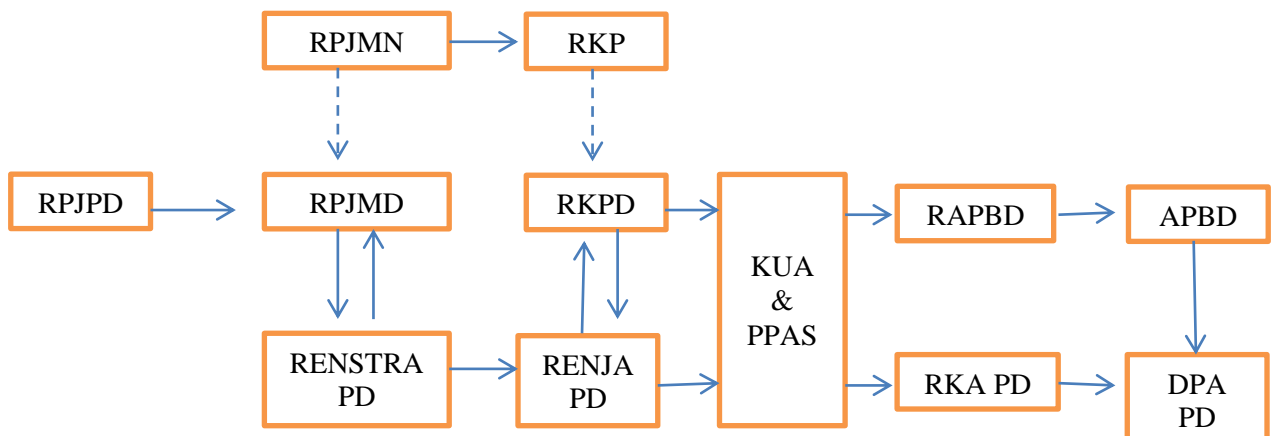
1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.

2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2023.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azaskoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintahanselama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan rencana kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2023.



1.2 Landasan Hukum

Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
 - n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
 - o. Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);

- q. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);
- r. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2023 serta dana yang dibutuhkan.
5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Perubahan rencana kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Perubahan rencana kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
- Analisis pelayanan OPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Rivew terhadap rancangan awal RKPD
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Garis besar isi penyusunan perubahan rencana kerja dan kegiatan

Masyarakat: BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan

Hukum 13 Maksud

dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULANII TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Target Kinerja 2023

3.2 Perubahan rencana kerja Kegiatan Tahun

2023BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 42.096.159.083,- namun sampai triwulan kedua tahun 2023 baru terrealisasi sebesar Rp. 11.618.448.219,- dengan persentase 27,60%. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan III, sehingga SPJ belum bisa diamprah. Disamping itu juga karena menunggu musim tanam

Beberapa program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diakibatkan oleh beberapa kendala yang dihadapi. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Adanya dampak el nino sehingga musim tanam tertunda menunggu ketersediaan air, mengakibatkan beberapa kegiatan belum bias diamprah
- Adanya beberapa Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mengalami pergeseran sehingga memerlukan waktu untuk merealisasikan anggaran.
- Beberapa kegiatan seperti pupuk, benih baru bias direalisasikan saat musim tanam tiba. Sehingga realisasi kegiatan menunggu musim tanam dilakukan.

Dengan belum tercapainya realisasi anggaran di triwulan ke II, berimplikasi pada pengajuan anggaran kegiatan yang diusulkan serta adanya penyesuaian anggaran dan target indicator yang juga mengalami perubahan dengan tujuan mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor pendorong tidak terpenuhinya target realisasi kinerja adalah dengan:

- Lebih mencermati lagi aliran kas
- Mengevaluasi indicator (alat ukur) agar lebih terarah dan terukur sesuai dengan kriteria SMART
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk usulan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Adapun capaian kinerja hingga triwulan kedua tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Per Triwulan II Tahun 2023

LAPORAN REALISASI APBD TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun 2022 (jumlah tahun 2021 + 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan II (APBD 2023; akumulasi sd TW berjalan)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Triwulan I Tahun 2023 (%)		Kendala
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		
		Dinas Pertanian			199,775,32 8,535		39,381,981, 085		42,096,15 9,083		11,618,448, 219.00		11,618,44 8,219.00	0	51,000,4 29,304.0 0	#DIV/0 !	26%	
1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	164,639,65 2,260	100%	26,196,394, 342	100%	30,737,06 5,683		11,055,328, 364.00		11,055,32 8,364.00	1	37,251,7 22,706.0 0	100	23%	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,000,000		9,044,494	100%	5,000,000		2,224,055		2,224,055	0	11,268,5 49.00	0	23%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	27,500,000	4	5,408,298	2	3,000,000	0	2,048,189	0	2,048,189	4	7,456,48 7.00	40	27%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	5	22,500,000	2	3,636,196	1	2,000,000	0	175,866	0	175,866	2	3,812,06 2.00	40.0%	17%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas	100%	151,924,08 8,605	100%	23,547,764, 908	100%	28,990,20 1,423	30%	10,530,578, 551	30%	10,530,57 8,551	1.3	34,078,3 43,459.0 0	130.0 %	22%	

	dan fungsi PD															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	144	151,756,956,495	144	23,506,223,464	100%	28,977,711,423	144	10,527,670,907	144	10,527,670,907	288	34,033,894,371.00	200.0%	22%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	10	121,550,625	4	37,024,888	2	9,997,000	0	1,995,336	0	1,995,336	4	39,020,224.00	40.0%	32%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan keuangan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (laporan)	10	45,581,485	4	4,516,556	2	2,493,000	0	912,308	0	912,308	4	5,428,864.00	40.0%	12%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1,711,494,030	100%	206,571,570	100%	132,122,400		37,096,766		37,096,766	1	243,668,336.00	100.0%	14%	
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	60	34,510,350	24	2,206,000	100%	1,102,800		1,009,101		1,009,101	24	3,215,101.00	40.0%	9%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (paket)	60	27,012,805	24	4,295,826	12	2,216,000	6	435,424	6	435,424	30	4,731,250.00	50.0%	18%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	60	323,845,595	24	92,447,400	12	48,748,700	6	11,245,240	6	11,245,240	30	103,692,640.00	50.0%	32%	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (paket)	60	68,588,705	24	6,969,686	12	4,210,900	6	935,674	6	935,674	30	7,905,360.00	50.0%	12%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (paket)	60	19,100,815	24		12	990,000					24	-	40.0%	0%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	60	671,199,510	24	79,206,154	12	55,219,000	6	11,039,327	6	11,039,327	30	90,245,481.00	50.0%	13%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)	60	567,236,250	24	21,446,504	12	19,635,000	2	12,432,000	2	12,432,000	26	33,878,504.00	43.3%	6%
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	9,405,893,625	100%	2,307,076,410	100%	1,510,133,300		474,720,242		474,720,242	1	2,781,796,652.00	100.0%	30%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat Menyurat (laporan)	60	53,309,020	24	16,200,000	12	9,055,000	6	1,870,000	6	1,870,000	30	18,070,000.00	50.0%	34%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan (Paaket)	120	1,741,209,665	48	277,649,342	24	286,498,900	12	57,797,295	12	57,797,295	60	335,446,637.00	50.0%	19%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (paket)	60	7,611,374,940	24	2,013,227,068	12	1,214,579,400	6	415,052,947	6	415,052,947	30	2,428,280,015.00	50.0%	32%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1,548,176,000	100%	125,936,960	100%	99,608,560		10,708,750		10,708,750	1	136,645,710.00	100.0%	9%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	250	648,176,000	100	92,536,960	50	82,312,000	4	9,537,150	4	9,537,150	104	102,074,110.00	41.6%	16%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)	200	900,000,000	80	33,400,000	40	17,296,560	5	1,171,600	5	1,171,600	85	34,571,600.00	42.5%	4%
2	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	10%	14,090,714,055	10%	3,959,151,877	10%	2,116,000,000		92,202,566		92,202,566	0.1	4,051,354,443.00	100.0%	29%
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	70%	13,444,746,310	50%	361,271,168	55%	380,000,000		67,032,415		67,032,415	0.5	428,303,583.00	71.4%	3%
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	5	7,222,373,155	2	185,441,108	1	230,000,000		62,504,341		62,504,341	2	247,945,449.00	40.0%	3%
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	5	6,222,373,155	2	175,830,060	1	150,000,000	0	4,528,074	0	4,528,074	2	180,358,134.00	40.0%	3%
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya (jenis)	6	630,543,865	2	35,836,795	3	250,000,000	0	1,663,318	0	1,663,318	2	37,500,113.00	33.3%	6%

		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian(VUB)	20	630,543,865	4	35,836,795	3	50,000,000	0	1,108,568	0	1,108,568	4	36,945,363.00	20.0%	6%
		Pemanfaatan SDG Hewan tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (jenis)	20	0	4		3	200,000,000	0	554,750	0	554,750	4	554,750.00	20.0%	#DIV/0!
		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak (ekor)	15	15,423,880	15	3,562,043,914	15	1,486,000,000	0	23,506,833	0	23,506,833	15	3,585,550,747.00	100.0%	23247%
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (paket)	195	15,423,880	78	3,562,043,914	39	1,486,000,000	0	23,506,833	0	23,506,833	78	3,585,550,747.00	40.0%	23247%
3	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	10%	18,846,577,320	10%	8,339,019,654	10%	7,755,368,400		46,353,463		46,353,463	0.1	8,385,373,117.00	100.0%	44%
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	2,223,594,425	52%	1,857,846,756	54%	1,120,368,400		27,003,687		27,003,687	0.52	1,884,850,443.00	86.7%	85%
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (dokumen)	5	0	2	45,756,006	1	0					2	45,756,006.00	40.0%	#DIV/0!
		Koordiansi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordiansi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	20	2,223,594,425	8	1,812,090,750	4	1,078,365,000		26,309,848		26,309,848	8	1,838,400,598.00	40.0%	83%

		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Komoditas Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Pertanian (tahun)	5	0	2		1	42,003,400		693,839		693,839	2	693,839.00	40.0%	#DIV/0!
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik (unit)	157	16,622,982,895	77	6,481,172,898	97	6,635,000,000		19,349,776		19,349,776	77	6,500,522,674.00	49.0%	39%
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	500	8,622,982,895	82	5,764,240,898	49						82	5,764,240,898.00	16.4%	67%
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	360	8,000,000,000	22	716,932,000	52	6,635,000,000	0	19,349,776	0	19,349,776	22	736,281,776.00	6.1%	9%
4	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	1,315,351,410	96%	459,968,330	97%	801,725,000		17,146,953		17,146,953	0.96	477,115,283.00	96.0%	36%
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (ekor)	21,000	1,092,002,135	8,000	459,968,330	11,000	761,725,000	0	8,555,828	0	8,555,828	8000	468,524,158.00	38.1%	43%

		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	5	1,092,002,135	2	459,968,330	1	761,725,000	0	8,555,828	0	8,555,828	2	468,524,158.00	40.0%	43%
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	150	223,349,275	110	0	120	40,000,000	0	8,591,125	0	8,591,125	110	8,591,125.00	73.3%	4%
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasnya Peredaran Hewan dan Produk Hewan (UUP)	40	223,349,275	0		120	40,000,000	0	8,591,125	0	8,591,125	0	8,591,125.00	0.0%	4%
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%	883,033,490	25%	427,446,882	30%	686,000,000	32%	407,416,873	32%	407,416,873	0.57	834,863,755.00	126.7%	95%
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	45%	883,033,490	25%	427,446,882	30%	686,000,000	32%	407,416,873	32%	407,416,873	0.57	834,863,755.00	126.7%	95%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	11	883,033,490	22	285,704,390	11	265,000,000	0	55,880,873	0	55,880,873	22	341,585,263.00	200.0%	39%
		Pegembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	10	0	20	141,742,492	10	421,000,000	0	351,536,000	0	351,536,000	20	493,278,492.00	200.0%	#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1

Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;

- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
- g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
- h. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat; koordinasipelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang miliknegara/daerah;
 - d. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dananggaran;
 - f. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dankearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayananpublik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;

- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;

- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencanapertanian kabupaten;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan kegiatanpeningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dantanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan kegiatanpengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatanhewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran padabidang penyuluhan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian.

2.2.1 Kondisi Pelayanan

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai "*stake holder*", maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensidan peluang pasar yang tersedia.

2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui terpenuhinya jumlah

sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdapatnya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petanian pangan / subak dan perkebunan.

3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Diseases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, surveilans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBD I, APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan container, N2 Cair, Inseminasi Kit , kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran.

Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit ataupun mati yang terkena penyakit-penyakit hewan yang bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasikan alat tersebut.

5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga

kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

Tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian adalah menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tabel berikut:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pertanian

adapun Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun
5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tanggadan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura
9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura
11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya

- manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
 16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).
 17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
 18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan rencana kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum –forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Perubahan rencana kerja DinasPertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing –masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Rivew terhadap RKPD Tahun 2023 sesuai dengan tabel 2.2 dibawah

Tabel 2.2 Rivew terhadap RKPD Tahun 2023

RKPD				Hasil Analisis Perubahan			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	30,261.003,243	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	30,261.003,243
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000,000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	28,490,201,423	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	28,490,201,423
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	132,122,400	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	132,122,400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	23,971,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	23,971,400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1,410,132,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1,410,132,100
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	199,575,920	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	199,575,920
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	1,913,425,580	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	1,913,425,580
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	55%	2,425,580	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	55%	2,425,580
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	3 jenis	250,000,000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	3 jenis	250,000,000

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,661,000,000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Ste k	1,661,000,000
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	7,945,368,400	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	7,945,368,400
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	54%	1,295,368,400	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	54%	1,295,368,400
Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97%	6,650,000,000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97%	6,650,000,000
Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	816,725,000	Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	816,725,000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11000 ekor	776,725,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11000 ekor	776,725,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	40,000,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	40,000,000
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	686,000,000	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	686,000,000

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	30%	686,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	30%	686,000,000
----------------------------------	---	-----	-------------	----------------------------------	---	-----	-------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2023. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023

Program	Kegiatan	Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
URUSAN PERTANIAN			36,524,429,820		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	31,086,876,688	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab Tabanan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7,000,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi	100%	28,954,004,008		

	keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD				
	Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	302,562,460		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	50,442,865		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1,624,879,095		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	147,988,260		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		10%	804,340,902	Kabid PSP	Kab Tabanan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	55%	659,601,527	Kabid PSP	Kab Tabanan
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	3 jenis	114,384,375	Kabid PSP	Kab Tabanan
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	Kabid PSP	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan		10%	4,225,024,730	Kabid PSP	Kab Tabanan
	Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	54%	402,003,400	Kabid PSP	
	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97 unit	3,823,021,330	Kabid PSP	Kab Tabanan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis		97%	236,250,000		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11000 ekor	236,250,000	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab Tabanan

kesehatan masyarakat veteriner					
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	0	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab Tabanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh		50%	171,937,500	Kabid Penyuluh an	Kab Tabanan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	30%	171,937,500	Kabid Penyuluh an	Kab Tabanan

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Target Kinerja 2023

Ditahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2023 seperti yang di tampilkan pada tabel 3.1 dibawah.

Tabel 3.1 Rencana Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023	
					Target	Rp APBD
		URUSAN PERTANIAN				36,524,429,820
Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	31,086,876,688
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	7,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja	2 Dokumen	4,000,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	3,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	28,954,004,008
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	28,925,129,008
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		100%	21,000,000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD Indikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	7,875,000
Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	302,562,460
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,334,150
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	4,666,935
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	55,950,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	11,849,900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3,300,000
	Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	115,961,475
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	98,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Terpeliharanya arsip pada SKPD	100%	10,500,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	50,442,865

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	1,624,879,095
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	9,056,250
				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	300,824,475
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,314,998,370
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	147,988,260
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	111,983,760
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	36,004,500
Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			10%	804,340,902
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		55%	659,601,527
				Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100,000,000
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	559,601,527
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya		3 jenis	114,384,375
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0
				Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 jenis tanaman	114,384,375

			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak		15 ekor dan 18500 pohon/Ste k	30,355,000
Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan			10%	4,225,024,730
			Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		54%	402,003,400
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	350,000,000
				Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Indikator: Tersedianya Data Statistik Pertanian	1 Tahun	52,003,400
				Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	97 unit	3,823,021,330
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: tersedianya Prasarana Pertanian	49 unit	1,798,021,330

				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Tersedianya Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	5 unit	175,000,000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	52 unit	1,000,000,000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Indikator: Terbangun dan terehabilitasinya Dam Parit dalam kondisi baik	8 unit	350,000,000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	12 unit	100,000,000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Potong Hewan dalam Kondisi Baik	1 unit	0
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Balai Penyuluh di Kecamatan	10 unit	200,000,000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Prasarana Lainnya dala Kondisi Baik	3 unit	200,000,000
Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Pernakan Indikator: Persentase pelayanan kehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kehatan hewan dan penerapan pengawasan			97%	236,250,000

	kesehatan masyarakat veteriner	persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		11000 ekor	236,250,000
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	236,250,000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan		120 dokumen	0
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Terawasnya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	120 dokumen	0
Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh			50%	171,937,500
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas		30%	171,937,500
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	171,937,500
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten		

3.3 Perubahan rencana kerja Kegiatan 2023

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat.

Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa

perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Perubahan rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2023 anggaran perubahan terdapat pada tabel 3.2 dibawah

Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																		Formulir RKPA-BELANJA SKPD		
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023																				
Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
3				URUS	AN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27			URUS	SAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				42,075,359,083	44,771,400	0	0	42,120,130,483	43,940,905,243	104,771,400	0	0	44,045,676,643	1.925.546.160	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			30	737,065,683	23,971,400	0	0	30,761,037,083	30,177,031,843	83,971,400	0	0	30,261,003,243	(500.033.840)	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua	3.	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	

3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13	2,122,400	0	0	0	132,122,400	132,122,400	0	0	0	132,122,400	0	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.	102,800	0	0	0	1,102,800	1,102,800	0	0	0	1,102,800	0
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PERTANIAN)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.	216,000	0	0	0	2,216,000	2,216,000	0	0	0	2,216,000	0
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERTANIAN)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48	748,700	0	0	0	48,748,700	48,748,700	0	0	0	48,748,700	0
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.	210,900	0	0	0	4,210,900	4,210,900	0	0	0	4,210,900	0
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99	0,000	0	0	0	990,000	990,000	0	0	0	990,000	0

3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55	219,000	0	0	0	55,219,000	55,219,000	0	0	0	55,219,000	0
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Tabanan, Semua	19	635,000	0	0	0	19,635,000	19,635,000	0	0	0	19,635,000	0
					Konsultasi SKPD (DINAS PERTANIAN)	Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan												
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		23,971,400	0	0	23,971,400	0	23,971,400	0	0	23,971,400	0
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERTANIAN)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	23,971,400	0	0	23,971,400	0	23,971,400	0	0	0	23,971,400	0
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.	510,133,300	0	0	0	1,510,133,300	1,410,132,100	0	0	0	1,410,132,100	(100.001.200)
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.	55,000	0	0	0	9,055,000	9,055,000	0	0	0	9,055,000	0

3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28	6,498,900	0	0	0	286,498,900	186,497,700	0	0	0	186,497,700	(100.001.200)
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERTANIAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.	214,579,400	0	0	0	1,214,579,400	1,214,579,400	0	0	0	1,214,579,400	0
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99	608,560	0	0	0	99,608,560	139,575,920	60,000,000	0	0	199,575,920	99.967.360
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82	312,000	0	0	0	82,312,000	97,312,000	0	0	0	97,312,000	15.000.000
					Lapangan (DINAS PERTANIAN)														
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17	296,560	0	0	0	17,296,560	42,263,920	0	0	0	42,263,920	24.967.360

3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERTANIAN)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		0		0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	60.000.000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.	116,000,000	0	0	0	2,116,000,000	4,336,580,000	0	0	0	4,336,580,000	2.220.580.000	
3	27	02	2.01	Pen	gawasan Penggunaan Sarana Pertanian			38	0	0	0	0	380,000,000	2,425,580,000	0	0	0	2,425,580,000	2.045.580.000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (DINAS PERTANIAN)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23	0	0	0	0	230,000,000	2,275,580,000	0	0	0	2,275,580,000	2.045.580.000	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (DINAS PERTANIAN)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			25	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanam	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	

					an (DINAS PERTANIAN)															
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (DINAS PERTANIAN)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.	486,000,000	0	0	0	1,486,000,000	1,661,000,000	0	0	0	1,661,000,000	175.000.000	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.	486,000,000	0	0	0	1,486,000,000	1,661,000,000	0	0	0	1,661,000,000	175.000.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			7.	755,368,400	0	0	0	7,755,368,400	7,945,368,400	0	0	0	7,945,368,400	190.000.000	
3	27	03	2.01	Pen	gembangan Prasarana Pertanian			1.	120,368,400	0	0	0	1,120,368,400	1,295,368,400	0	0	0	1,295,368,400	175.000.000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.	78,365,000	0	0	0	1,078,365,000	1,253,365,000	0	0	0	1,253,365,000	175.000.000	

3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan (DINAS PERTANIAN)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42	3,400	0	0	0	42,003,400	42,003,400	0	0	0	42,003,400	0
3	27	03	2.02	Pe m	bangunan Prasarana Pertanian			6.	635,000,000	0	0	0	6,635,000,000	6,650,000,000	0	0	0	6,650,000,000	15.000.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.	635,000,000	0	0	0	6,635,000,000	6,650,000,000	0	0	0	6,650,000,000	15.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			80	1,725,000	0	0	0	801,725,000	816,725,000	0	0	0	816,725,000	15.000.000
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			76	1,725,000	0	0	0	761,725,000	776,725,000	0	0	0	776,725,000	15.000.000
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (DINAS PERTANIAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76	1,725,000	0	0	0	761,725,000	776,725,000	0	0	0	776,725,000	15.000.000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			40	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0

3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (DINAS PERTANIAN)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0
3	27	07		P R O G	RAM PENYULUHAN PERTANIAN			66	5,200,000	20,800,000	0	0	686,000,000	665,200,000	20,800,000	0	0	686,000,000	0
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			66	5,200,000	20,800,000	0	0	686,000,000	665,200,000	20,800,000	0	0	686,000,000	0
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DINAS PERTANIAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24	4,200,000	20,800,000	0	0	265,000,000	244,200,000	20,800,000	0	0	265,000,000	0
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (DINAS PERTANIAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42	1,000,000	0	0	0	421,000,000	421,000,000	0	0	0	421,000,000	0

BAB V PENUTUP

Dokumen Perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Ditahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2023. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan.